



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SUB UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMINAR BUDI SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
3. NHK : **157438**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 1015 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.534.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.101.500**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 420.135.500**III. HUTANG** Rp. 140.966.726**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 279.168.774

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.